

Simultaneous Regional Elections and Their Relevance to National Defense

Surya Iman Wahyudi^{1*}, Priyanto², Afrizal Hendra³

Defense University of Republic Indonesia

Corresponding Author: Surya Iman Wahyudi suryaimanw@gmail.com

ARTICLE INFO

*Keywords: Simultaneous
Regional Head Elections,
National Defense*

Received : 27, May

Revised : 28, June

Accepted: 30, July

©2026 Wahyudi, Priyanto, Hendra:

This is an open-access article
distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study examines Simultaneous Regional Head Elections in Indonesia and their role in strengthening local democracy and national defense. The objective is to analyze their impact on political stability, social cohesion, and national security. A qualitative literature review method was used by analyzing relevant sources on elections, democracy, and national resilience. The findings show that simultaneous regional elections enhance democratic processes, transparency, accountability, and good governance at the local level. However, challenges such as political tensions, social polarization, and potential conflicts may threaten stability. The study concludes that simultaneous regional elections contribute to national defense by supporting a stable and accountable governance system. Continuous political education and strict oversight are needed to ensure their effectiveness in strengthening Indonesia's national resilience.

Pilkada Serentak dan Relevansinya dengan Pertahanan Nasional

Surya Iman Wahyudi^{1*}, Priyanto², Afrizal Hendra³

Defense University of Republic Indonesia

Corresponding Author: Surya Iman Wahyudi, suryaimanw@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Pertahanan Nasional.

Received : 27, May

Revised : 28, June

Accepted: 30, July

©©2026 Wahyudi, Priyanto, Hendra:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Indonesia dan perannya dalam memperkuat demokrasi lokal serta pertahanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampaknya terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, dan keamanan nasional. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber yang relevan mengenai pemilu, demokrasi, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Serentak dapat meningkatkan proses demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah. Namun, berbagai tantangan seperti ketegangan politik, polarisasi sosial, dan potensi konflik dapat mengancam stabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pilkada Serentak berkontribusi terhadap pertahanan nasional melalui dukungannya terhadap sistem pemerintahan yang stabil dan akuntabel. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas Pilkada Serentak dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Pilkada menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, sebab melalui mekanisme ini masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya melalui pemilihan secara langsung. Pilkada juga merupakan proses yang menunjukkan norma demokrasi dan berfungsi sebagai elemen kunci dalam perkembangan politik dan sosial pada tingkat pemerintahan lokal (Fadhilah, 2019). Indonesia menyelenggarakan Pilkada serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2015. Mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Desember 2015 dianggap sebagai langkah pertama yang penting dalam membangun demokrasi dan politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan adanya pilkada serentak, diharapkan ke depan dapat tercipta sistem politik dan demokrasi yang lebih maju dan bermutu.

Keinginan kuat dari masyarakat untuk beralih ke sistem Pilkada langsung berakar dari anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui perwakilan tidak lagi sejalan dengan asas demokrasi. Pola tersebut hanya menempatkan segelintir anggota DPRD sebagai penentu kepala daerah, sementara demokrasi yang otentik semestinya memberi ruang bagi seluruh warga negara untuk terlibat langsung dalam memilih pemimpinnya. Praktik pengalihan suara rakyat kepada wakil-wakil di DPRD dipandang lemah dari sisi legitimasi sosial, karena gagal mencerminkan aspirasi mayoritas warga (Siti, 2020). Tidak hanya itu, proses semacam ini juga kerap diwarnai oleh praktik politik uang, yang berujung pada terpilihnya pemimpin yang berpotensi melakukan tindak korupsi.

Mekanisme pemilihan langsung kepala daerah digadang-gadang mampu memberi kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi, pengelolaan pemerintahan daerah, sekaligus kinerja institusi lokal. Terdapat tiga harapan pokok masyarakat berkaitan dengan sistem ini: (1) tumbuhnya kehidupan demokrasi di tingkat lokal, dengan asumsi bahwa kepala daerah hasil pemilihan langsung akan lebih peka terhadap aspirasi dan kesejahteraan warganya (Amrullah, 2015), berbeda dari pola sebelumnya yang menempatkan loyalitas kepala daerah lebih kepada partai politik ketimbang rakyat; (2) terbentuknya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sebagai koreksi atas kondisi masa lalu yang cenderung mengabaikan aspirasi rakyat akan pemerintahan yang bersih (Martono, 2020); serta (3) meningkatnya kinerja lembaga-lembaga politik lokal, dengan harapan agar institusi tersebut dapat menjalankan fungsinya sesuai ekspektasi publik melalui mekanisme pemilihan langsung (Faroek, 2008).

Pilkada serentak sejatinya diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemilu dan mengurangi potensi konflik yang sering muncul ketika Pilkada dilakukan terpisah-pisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya (Putra, 2018). Meskipun Pilkada serentak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, dampaknya terhadap stabilitas sosial, politik dan ekonomi perlu diperhatikan, terutama dalam konteks pertahanan dan ketahanan nasional.

Secara mendasar, penyelenggaraan Pilkada serentak mencerminkan penerapan prinsip demokrasi, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk

menentukan pemimpin yang dinilai mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi daerahnya (Gafar, 2003). Namun, dalam praktiknya, Pilkada serentak membawa dampak yang signifikan terhadap dinamika politik di tingkat daerah yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Adanya ketegangan politik, konflik sosial, dan perpecahan yang terjadi pasca Pilkada dapat merembet ke tingkat yang lebih luas, mengganggu keharmonisan sosial dan berdampak pada integritas negara (Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, Pilkada serentak tidak hanya dipandang sebagai peristiwa politik lokal semata, melainkan sebagai bagian integral yang sangat relevan dalam menjaga ketahanan nasional.

Pilkada serentak sangat berhubungan dengan ketahanan sosial dan politik negara (Wahyudi, 2020). Stabilitas politik di tingkat lokal merupakan elemen krusial dalam mempertahankan ketahanan nasional dan tidak boleh diabaikan. Ketika sebuah daerah mengalami ketegangan politik yang signifikan akibat Pilkada, hal ini dapat mengganggu ketahanan sosial serta politik secara keseluruhan. Kestabilan politik daerah sangat berhubungan dengan ketahanan nasional, karena ketidakstabilan di tingkat daerah sering kali menjadi pemicu ancaman terhadap keamanan nasional (Nasution, 2017). Ketegangan yang muncul setelah Pilkada bisa berkembang menjadi kerusuhan sosial, perpecahan, atau bahkan konflik terbuka yang merusak tatanan sosial dan politik negara. Sebagai contoh, perpecahan yang disebabkan oleh hasil Pilkada dapat memperburuk situasi dan merusak solidaritas sosial yang telah dibangun selama ini.

Lebih Lanjut, Pilkada serentak yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia berpotensi menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki preferensi politik yang berbeda. Konflik politik yang terjadi sering kali disertai dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau *hoaks*, dapat memperburuk kondisi sosial dan memperdalam polarisasi antar kelompok (Rahman, 2018). Dampak dari polarisasi ini pada akhirnya bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dan memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya mengancam stabilitas negara secara keseluruhan.

Menjaga stabilitas sosial setelah Pilkada sangat penting untuk mendukung ketahanan sosial negara (Siregar, 2016). Ketegangan sosial yang muncul akibat perbedaan pilihan politik dalam Pilkada sering kali menciptakan polarisasi yang tidak hanya membagi masyarakat, tetapi juga merusak kualitas kehidupan sosial. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hasil Pilkada yang kontroversial bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan. Gangguan pada keamanan sosial ini tentunya akan berdampak jangka panjang terhadap ketahanan nasional, karena dalam keadaan yang tidak stabil, potensi ancaman terhadap negara akan semakin besar.

Dari sudut pandang ekonomi, Pilkada serentak juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di tingkat daerah maupun nasional (Hidayat, 2019). Ketidakstabilan pasca Pilkada dapat mengganggu aktivitas ekonomi, baik lokal maupun nasional. Pembekuan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh

ketegangan sosial atau kerusuhan setelah Pilkada dapat merusak hubungan ekonomi antar daerah dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, biaya yang timbul akibat penanganan konflik sosial atau politik yang dipicu oleh Pilkada akan menambah beban ekonomi negara.

Oleh karena itu, relevansi Pilkada serentak terhadap ketahanan nasional harus dianalisis secara menyeluruh, mencakup dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Pilkada lebih dari sekadar proses pemilihan pemimpin daerah; ia juga merupakan alat untuk menguji ketahanan sosial dan politik suatu negara (Suryadi, 2017). Dengan demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan lancar agar tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak ketahanan nasional. Pilkada yang berlangsung dengan aman dan damai akan meningkatkan legitimasi pemerintahan di tingkat daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas nasional (Indonesia, 2017).

Pelaksanaan Pilkada serentak yang berhasil dapat memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Pemimpin daerah yang terpilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pilkada serentak memiliki legitimasi yang kuat, memberi dasar yang kokoh untuk menerapkan kebijakan yang mendukung ketahanan nasional. Selain itu, Pilkada serentak memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang nantinya diharapkan memberikan sumbangsih positif untuk pembangunan nasional (Uba, 2016).

Namun, pelaksanaan Pilkada serentak tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik politik antara calon pemimpin daerah dan para pendukungnya (Husein, 2018). Ketegangan politik yang terjadi setelah Pilkada seringkali diiringi dengan munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas atau terpinggirkan oleh hasil pemilihan. Ketidakpuasan ini dapat berkembang menjadi protes sosial yang meluas, yang bisa mengancam stabilitas daerah dan memperburuk ketegangan sosial (Wahyudi, 2020). Dengan demikian, konflik semacam ini perlu ditangani dengan baik supaya tidak berdampak lebih jauh terhadap ketahanan nasional.

Disamping itu, peran media sosial dalam Pilkada serentak juga harus diperhatikan. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial sering kali menjadi faktor utama yang memicu polarisasi dan ketegangan politik. Informasi yang salah atau hoaks yang beredar selama Pilkada dapat memperburuk hubungan antar kelompok, memperdalam perpecahan sosial, dan meningkatkan ketegangan politik. Oleh karena itu, pengelolaan informasi yang bijak serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang damai sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Pilkada serentak juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi yang solid antara kedua level pemerintahan tersebut akan menjamin lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan nasional. Pemerintah pusat dituntut untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah guna memastikan penyelenggaraan Pilkada berlangsung lancar tanpa hambatan yang

berpotensi mengganggu stabilitas negara. Sementara itu, pemerintah daerah juga dituntut bersikap proaktif dalam menjaga situasi yang aman dan tertib selama proses Pilkada berlangsung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pentingnya stabilitas di tingkat daerah dalam konteks ketahanan nasional juga menuntut pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dalam Pilkada serentak (Martono, 2020). Pengawasan yang efektif akan memastikan Pilkada berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa kekerasan. Atas dasar itu, peran KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu menjadi sangat krusial dalam menjamin kelancaran Pilkada serentak, sekaligus mencegah timbulnya konflik sosial maupun kerusuhan yang berisiko merusak stabilitas dan ketahanan nasional.

Dapat disimpulkan bahwa Pilkada serentak memiliki peran ganda: memperkuat demokrasi lokal sekaligus mendukung terwujudnya pertahanan nasional. Perlu dipahami bahwa pertahanan nasional bukan hanya soal kesiapan di bidang militer, tetapi juga mencakup aspek ketahanan ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara. Pada konteks ini, stabilitas politik yang dihasilkan dari Pilkada serentak dapat memperkuat ketahanan negara secara keseluruhan. Pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat memberikan legitimasi yang lebih tinggi kepada kepala daerah, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas kebijakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian pustaka, yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik Pilkada Serentak dan relevansinya terhadap pertahanan nasional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami berbagai sumber sekunder yang terkait dengan Pilkada, demokrasi lokal, ketahanan sosial, politik, dan ekonomi, serta hubungan langsungnya dengan stabilitas nasional. Dalam kerangka penelitian ini, *library research* memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pemikiran dan teori yang ada serta menghubungkannya dengan fenomena Pilkada serentak yang terjadi di Indonesia.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan Pilkada serentak, serta dampaknya terhadap ketahanan nasional. Sumber-sumber ini akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami dinamika yang terjadi pada tingkat lokal dan dampaknya terhadap stabilitas politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Selain itu, analisis akan dilakukan terhadap teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi, partisipasi politik, serta pertahanan nasional, untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana Pilkada serentak berperan dalam memperkuat atau mengancam ketahanan nasional.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten, yang melibatkan pengkategorian dan pengolahan informasi dari literatur yang relevan. Peneliti

akan mengidentifikasi tema-tema utama dalam setiap sumber dan membandingkan berbagai perspektif tentang bagaimana Pilkada serentak berhubungan dengan ketahanan nasional. Dalam proses ini, penting untuk menilai berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Pilkada, termasuk potensi konflik politik dan sosial yang dapat memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap ketahanan nasional.

Dengan pendekatan *library research*, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan Pilkada serentak dengan pertahanan nasional. Diharapkan, temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan terkait pelaksanaan Pilkada yang lebih efektif dalam menopang ketahanan nasional, sekaligus menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan Pilkada di masa mendatang..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kebijakan pilkada serentak disepakati, dibutuhkan proses yang tidak singkat dan penuh dinamika sepanjang tahun 2014-2015. Tahap awal pilkada serentak diselenggarakan pada Desember 2015, kemudian berlanjut bertahap hingga fase terakhir yang direncanakan pada 2023. Di tengah periode pelaksanaan tersebut, tepatnya tahun 2019, muncul kebijakan untuk pertama kalinya menyatukan pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dalam satu pemilihan nasional serentak. Sebagai tahap akhir, mulai 2024 Indonesia direncanakan hanya akan menggelar dua jenis pemilihan, yaitu pemilihan nasional serentak dan pemilihan kepala daerah serentak.

Merujuk pada UU No. 8/2015, skenario pilkada serentak disusun secara bertahap. Tahapan pertama dimulai pada Desember 2015, menyasar daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 hingga semester pertama 2016. Tahap kedua kemudian dilaksanakan pada Februari 2017, ditujukan bagi daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 sampai sepanjang tahun 2017. Sementara itu, daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2018 dan 2019 akan menggelar pilkada serentak pada Juni 2018. Tahun 2019 menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilu legislatif digabungkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pemilu nasional serentak. Tahapan pilkada serentak selanjutnya berlangsung pada 2020, 2022, dan berakhir pada 2023, dengan target seluruh Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak secara menyeluruh pada 2027. Pasca 2027, format pemilu Indonesia akan disederhanakan menjadi dua kategori: pemilu nasional (legislatif serta presiden dan wakil presiden) dan pemilihan kepala daerah.

Ada tiga alasan mendasar di balik desain pelaksanaan pemilu ini. Pertama, jika menilik pengalaman pilkada pada kurun 2005-2014, tampak jelas ketidakteraturan dalam penjadwalannya, mengingat hampir setiap tahun ada daerah yang menggelar pilkada. Kondisi tersebut menimbulkan kejenuhan penyelenggaraan yang kerap dibarengi kegaduhan dan konflik di tingkat lokal, yang berpotensi berkembang menjadi konflik berskala nasional. Kedua, gagasan

pilkada serentak pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan efisiensi bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus membangun demokrasi lokal yang lebih inklusif dan memudahkan partai politik, pasangan calon, penyelenggara, serta pemilih. Ketiga, pilkada serentak juga berperan penting dalam memperkuat sistem pemerintahan, sebagaimana tercermin dari siklus pemilu yang jauh lebih terorganisir dan tersusun rapi.

Dalam rangka menciptakan siklus pemilu yang lebih tertata, pemilu serentak semestinya diselenggarakan dalam dua jenjang, yakni pemilu serentak nasional—yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden—serta pemilu serentak daerah, yang mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/wali kota dan wakilnya. Penerapan dua jenjang pemilu serentak ini memungkinkan proses pengisian jabatan legislatif dan eksekutif dimulai terlebih dahulu di level nasional, baru kemudian merambah ke level daerah. Selain bersandar pada dasar konstitusional yang kuat, skema pemilu serentak nasional (legislatif dan eksekutif) beserta pemilu serentak daerah ini juga dilandasi oleh argumen-argumen yang cukup kuat.

Pertama, penyatuan pemilu eksekutif dan legislatif di level nasional memiliki keterkaitan yang begitu kuat. Di satu sisi, sosok calon presiden (capres) pastinya merepresentasikan garis ideologi partai politik pengusungnya. Akan tetapi, di sisi lain, capres juga dituntut menyusun visi-misi yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, terjalin keterkaitan langsung antara kepentingan publik, sosok capres, serta partai politik yang mengusungnya. *Kedua*, kondisi ini akan mempererat keterkaitan antara komitmen partai politik, para calon legislatif, dan capres. Visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan oleh capres, partai politik, serta calon legislatif akan saling menguatkan satu sama lain dalam penyusunan strategi maupun kampanye mereka. Alhasil, ketiga elemen tersebut akan bersinergi dan saling menopang selama proses pemilu berlangsung. Dari titik ini, tampak jelas adanya keterkaitan antara pilihan pemilih terhadap partai politik dengan pilihan mereka atas presiden.

Ketiga, apabila pemilu diselenggarakan secara serentak, akan terbentuk keterkaitan yang nyata antara capaian pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif. Hasil pemilu legislatif berpotensi memengaruhi hasil pemilu eksekutif, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pemenang kontestasi eksekutif untuk merupakan figur yang diusung oleh partai pemenang kontestasi legislatif. Ditinjau dari perspektif ketatanegaraan, situasi semacam ini akan memperkuat sistem presidensial yang dianut, mengingat presiden terpilih memperoleh sokongan dari partai pemenang pemilu legislatif. Pada kondisi seperti ini, akan terbangun relasi yang lebih produktif antara parlemen dengan pemerintah.

Keempat, skema ini juga berpotensi meminimalkan rasa jenuh masyarakat yang selama ini harus mengikuti berbagai pemilu yang digelar secara terpisah-pisah. Meski demikian, patut diperhatikan bahwa frekuensi pemilu yang terlalu tinggi dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemilu tak lebih dari

sekadar gangguan rutinitas, terlebih jika hasilnya dirasa tidak berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Dalam konteks pemilihan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan serentak, calon presiden (capres) tidak hanya mencerminkan ideologi partai politik yang mendukungnya, tetapi juga harus merumuskan visi dan misi yang mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat. Hal ini menciptakan hubungan yang erat antara kepentingan rakyat, capres, dan partai politik. Kepemimpinan yang memiliki koneksi langsung dengan rakyat akan memperkuat legitimasi politik, yang pada gilirannya mendukung stabilitas nasional. Legitimasi ini penting dalam konteks pertahanan nasional karena stabilitas politik penentu dalam ketahanan negara. Pemimpin yang dipilih harus mempunyai dasar yang kuat dalam menjalankan kebijakan yang mendukung kepentingan nasional.

Adanya hubungan yang lebih erat antara partai politik, calon anggota legislatif, dan capres akan menghasilkan visi, misi, dan program yang saling mendukung. Kolaborasi ini menciptakan suatu kesatuan dalam penyusunan kebijakan dan kampanye yang lebih terarah. Dari perspektif ketahanan nasional, koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif ini dapat memperkuat pemerintahan yang stabil dan efektif. Ketika pemerintah pusat dan daerah memiliki keselarasan dalam kebijakan dan program, respons terhadap tantangan internal maupun eksternal dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional. Dalam sistem presidensial, hal ini mengarah pada pemerintahan yang lebih efisien dan tidak terpecah, yang esensial dalam menjaga stabilitas negara.

Penyelenggaraan pemilu serentak juga menciptakan hubungan yang jelas antara hasil pemilu legislatif dan eksekutif. Ketika pemenang pemilu eksekutif didukung oleh partai yang menang dalam pemilu legislatif, hal ini memperkuat sistem presidensial yang diterapkan. Sebagai hasilnya, hubungan antara parlemen dan pemerintah menjadi lebih konstruktif, karena kedua komponen tersebut mendukung satu sama lain dalam merancang kebijakan nasional. Dalam konteks pertahanan nasional, sistem yang solid dan terkoordinasi antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan stabilitas yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Ketegangan politik yang bisa mengganggu ketahanan nasional, seperti dalam konflik antara cabang eksekutif dan legislatif, dapat diminimalisir.

Sistem Pilkada serentak juga memiliki potensi untuk mengurangi kejenuhan masyarakat akibat pemilu yang terlalu sering dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Masyarakat yang merasa terganggu dengan banyaknya pemilu mungkin akan menurunkan partisipasi mereka, yang berpotensi mengurangi legitimasi pemilu itu sendiri. Ketika pemilu dilakukan secara serentak, masyarakat tidak merasa terbebani oleh proses pemilu yang berulang-ulang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi politik. Dalam konteks pertahanan nasional, partisipasi politik yang tinggi berkontribusi pada penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara, yang sangat penting dalam membangun ketahanan sosial dan politik negara. Rakyat yang terlibat aktif dalam proses politik akan lebih peduli terhadap isu-isu nasional dan mendukung kebijakan yang memperkuat pertahanan negara.

Masyarakat berharap bahwa pemilihan pemimpin melalui sistem pemilihan langsung dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul akibat sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya. Dengan demikian, pemimpin daerah yang lahir dari proses pilkada langsung diharapkan sanggup menghadirkan perbaikan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejalan dengan penerapan prinsip good governance. Di samping itu, kepala daerah tersebut diharapkan pula mampu menjawab berbagai tantangan mendasar yang dihadapi warganya, terutama dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, serta terciptanya keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pilkada Serentak di Indonesia memiliki relevansi penting tidak hanya dalam konteks demokrasi lokal, tetapi juga dalam kerangka ketahanan nasional. Pilkada Serentak dapat memperkuat stabilitas politik dan sosial di tingkat daerah yang berpengaruh langsung terhadap ketahanan negara secara keseluruhan. Dalam hal ini, kita bisa menghubungkan Pilkada Serentak dengan teori perang Carl von Clausewitz yang terkenal dengan pandangannya bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara yang berbeda, dan bahwa politik dan perang memiliki hubungan yang erat dalam menjaga ketahanan negara (Clausewitz, 2000).

Clausewitz menekankan bahwa dalam perang, unsur politik harus menjadi landasan utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan strategi. Dalam konteks Pilkada Serentak, stabilitas politik di tingkat lokal sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional. Pilkada Serentak yang dapat berjalan dengan baik akan menciptakan pemerintahan daerah yang sah dan kuat, yang pada gilirannya memperkuat struktur politik dan sosial negara secara keseluruhan. Seperti dalam perang, ketahanan politik lokal yang baik dapat memperkuat posisi negara dalam menghadapi tantangan eksternal, serta mengurangi potensi ancaman yang berasal dari ketidakstabilan internal (Clausewitz, 2000).

Salah satu konsep penting dalam teori Clausewitz adalah "*center of gravity*," yaitu elemen atau titik kekuatan yang paling penting dalam sebuah negara yang perlu dilindungi dalam peperangan. Dalam konteks Pilkada Serentak, stabilitas politik lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi bisa dianggap sebagai "*center of gravity*" negara, yang harus dijaga agar tidak mudah terguncang. Ketika pemerintahan daerah memiliki legitimasi yang kuat dan hubungan yang baik dengan rakyatnya, hal ini akan memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan. Pilkada Serentak yang sukses akan memperkuat pondasi politik negara, yang menjadi kunci dalam menghadapi ancaman domestik dan internasional.

Relevansi dari sistem pemilihan kepala daerah langsung ini terhadap pertahanan nasional terletak pada penguatan stabilitas politik dan sosial. Ketika kepala daerah terpilih langsung oleh rakyat, maka mereka lebih memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kebijakan yang pro-rakyat dan mengedepankan kepentingan nasional. Pemerintahan yang bersih dan efektif di tingkat lokal akan mengurangi potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan nasional. Selain itu, melalui pemilihan langsung, masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam proses

politik, yang memperkuat rasa kebersamaan dan kesadaran berbangsa, penting untuk menciptakan ketahanan sosial yang solid. Dengan demikian, sistem pilkada langsung mendukung keberlanjutan stabilitas nasional dan ketahanan negara.

Terkait dengan hubungan antara kepala daerah dan DPRD, perlu merujuk pada konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) sebagaimana tercermin dalam UU No.22/1999 yang diubah oleh UU No.32/2004, meskipun pemisahan tersebut masih pada level formal. Pemisahan dan keseimbangan wewenang antara kepala daerah dan DPRD ini, memberikan penguatan stabilitas pemerintahan yang akan berkontribusi pada ketahanan negara. Dengan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, keduanya dapat saling mengawasi dan mendukung kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas politik yang tercipta di tingkat daerah sangat penting untuk mempertahankan ketahanan sosial dan politik nasional. Ketegangan atau konflik antara kepala daerah dan DPRD yang tidak seimbang dalam wewenang dapat mengganggu kestabilan yang pada akhirnya merusak ketahanan nasional. Oleh karena itu, sistem pemisahan kekuasaan yang jelas dan seimbang di tingkat daerah berperan penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan negara secara keseluruhan.

Penerapan jeda waktu selama 30 bulan (dua setengah tahun) antara pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diyakini akan memperkuat sinergi antara pemerintahan nasional dan daerah dalam konteks Negara Kesatuan. Wujud sinergi tersebut dapat dilihat dari dua sisi: pertama, koalisi partai politik di tingkat nasional berpeluang besar untuk sejalan dengan koalisi di tingkat daerah; kedua, visi, misi, dan program pembangunan di daerah akan lebih harmonis, bahkan berpotensi menjadi elaborasi dari visi, misi, dan program pembangunan yang sudah dirumuskan di tingkat nasional.

Sinergi antara pemilu nasional dan lokal serentak muncul dari dua hal. Pertama, keduanya sama-sama melalui masa persiapan matang selama satu-dua tahun, di mana partai politik membangun koalisi berdasarkan kesamaan ideologi dan kecocokan mendukung capres-cawapres. Koalisi yang terbentuk di level nasional ini kemudian turut mewarnai agenda kampanye untuk pemilu presiden maupun legislatif. Kedua, karena pemilu nasional lebih dulu diselenggarakan, kesepakatan politik yang sudah terbangun di level nasional cenderung terbawa ke pemilu lokal berikutnya. Sinergi ini juga bergantung pada bagaimana partai politik menjalankan dua fungsi utamanya: menyiapkan dan mengusung kandidat pemimpin melalui proses rekrutmen dan kaderisasi, serta merumuskan kebijakan publik berdasarkan aspirasi konstituen.

Digelarnya dua jenis pemilu memberi rakyat dua peluang menyatakan kedaulatannya. Jeda waktu minimal dua tahun sebelum pemilu lokal memungkinkan pemilih menilai kinerja pemerintahan nasional terlebih dahulu, sekaligus mempertimbangkan rekam jejak partai yang sama di level berbeda. Pemilih yang teredukasi cenderung lebih rasional karena: perbandingan calon menjadi lebih jelas ketika pemilihan nasional-lokal dipisah, isu kebijakan yang ditawarkan lebih spesifik sesuai tingkatannya, dan adanya dua kesempatan bersuara memperkuat daya tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini pada akhirnya

meningkatkan akuntabilitas pemerintah, mendorong kebijakan yang lebih responsif, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan domestik maupun eksternal.

Dengan demikian, pelaksanaan pilkada serentak yang semakin efektif dan terstruktur tidak hanya memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas politik yang mendukung ketahanan nasional. Pemilu yang lebih berkualitas dan efisien menciptakan pemerintahan yang lebih kuat dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memperkuat struktur sosial dan politik negara, serta memastikan ketahanan nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pilkada serentak di Indonesia merupakan sebuah langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal dan nasional. Dengan adanya sistem pemilihan yang serentak, tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pemilu, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintahan pusat dan daerah. Pelaksanaan pilkada serentak dapat memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih secara langsung oleh rakyat, yang pada gilirannya mendukung stabilitas politik dan pertahanan nasional. Namun, tantangan yang tetap harus dihadapi adalah potensi ketegangan politik dan sosial, serta risiko konflik yang dapat mempengaruhi integritas negara. Oleh karena itu, pengelolaan pilkada yang lebih baik, termasuk pendidikan politik yang efektif dan pengawasan yang ketat, menjadi penting untuk memastikan bahwa Pilkada serentak berfungsi sebagai sarana dalam memperkuat ketahanan nasional. Pada akhirnya, dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang berkualitas, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mengurangi potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas sosial serta menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Pilkada serentak juga memiliki relevansi yang signifikan dalam memperkuat pertahanan nasional. Dengan menciptakan pemerintahan yang stabil dan akuntabel di tingkat lokal, Pilkada serentak berkontribusi pada pengelolaan yang lebih efektif terhadap berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Stabilitas yang terjaga di tingkat daerah akan mempengaruhi secara positif ketahanan negara secara keseluruhan, mengurangi potensi konflik sosial, dan memperkuat kohesi antar wilayah.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, serta memperketat pengawasan terhadap potensi politik uang dan provokasi konflik. Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, serta lembaga pengawas pemilu diperlukan untuk menjaga stabilitas selama proses Pilkada serentak. Upaya ini penting agar Pilkada serentak tidak hanya menjadi instrumen demokrasi, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak kepada civitas akedemika Universitas Pertahanan, bapak Priyanto dan bapak Afrizal Hendra, bapak Sulistyanto dan mbak Astrid, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan serta rekan-rekan di Prodi Strategi Perang Semesta Cohort-15.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, N. (2015). *Tantangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak dan implikasinya bagi ketahanan negara*. Jurnal Ketahanan Sosial, 3(2), 77-90.
- Bawaslu. (2017). *Laporan pemantauan Pilkada serentak 2017*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
- Budi, S. (2021). *Peran media sosial dalam polarisasi politik Pilkada serentak dan dampaknya terhadap ketahanan sosial*. Jurnal Komunikasi Politik, 12(1), 52-68.
- Clausewitz, C. V. (2000). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds.). Princeton University Press. (Original work published 1832).
- Fadhilah, H. (2019). *Pilkada serentak dan peran pemerintah dalam memastikan keberlanjutan stabilitas politik dan sosial*. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 5(3), 120-135.
- Farook, A. (2008). *Membangun demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah langsung*. Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Gafar, M. (2003). *Pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi Indonesia*. Bandung: Pustaka Demokrasi.
- Hidayat, T. (2019). *Pendidikan politik dalam menjaga stabilitas pasca Pilkada serentak*. Jurnal Pendidikan Politik, 4(2), 77-92.
- Husein, M. (2018). *Polarisasi sosial akibat Pilkada serentak dan dampaknya terhadap kohesi sosial*. Jurnal Sosial Politik, 10(1), 43-58.
- Indonesia, P. (2015). *Pelaksanaan Pilkada serentak: Evaluasi dan tantangan ke depan*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kurniawan, B. (2021). *Dinamika politik lokal pasca Pilkada serentak dan dampaknya terhadap ketahanan nasional*. Jurnal Politik Indonesia, 12(1), 45-60.
- Martono, D. (2020). *Partisipasi politik dalam Pilkada serentak dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan daerah*. Jurnal Demokrasi dan Pembangunan, 9(1), 21-35.
- Nasution, E. (2017). *Keterkaitan Pilkada serentak dengan ketahanan nasional di*

Indonesia. Jakarta: Penerbit Demokrasi.

- Nurhadi, R. (2016). *Penyelenggaraan Pilkada serentak sebagai upaya untuk meningkatkan demokrasi dan stabilitas nasional*. Jurnal Ilmu Politik, 14(1), 30-45.
- Priyanto, E. (2017). *Hubungan antara Pilkada serentak dan stabilitas nasional*. Jurnal Politik dan Ketahanan Nasional, 11(4), 78-93.
- Putra, A. (2018). *Pilkada serentak dan pengaruhnya terhadap stabilitas sosial-politik di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan Daerah, 5(3), 23-39.
- Rahman, A. (2018). *Mengelola ketegangan politik setelah Pilkada serentak: Pengaruhnya terhadap integritas negara*. Jakarta: Penerbit Politik.
- Siregar, R. (2016). *Pengaruh Pilkada serentak terhadap kualitas demokrasi dan governance di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Siti, N. (2020). *Evaluasi Pilkada serentak 2020: Proses, tantangan, dan keberlanjutan demokrasi*. Jakarta: Penerbit Politik Indonesia.
- Subagio, R. (2020). *Pilkada serentak: Membentuk pemerintahan lokal yang stabil dan berpengaruh terhadap ketahanan nasional*. Jakarta: Pustaka Pemerintahan.
- Suryadi, A. (2017). *Dinamika politik Pilkada serentak: Antara harapan dan realita*. Jakarta: Media Pustaka.
- Syamsudin, Z. (2019). *Pilkada serentak dan tantangan dalam menjaga ketahanan sosial-politik*. Jurnal Politik Indonesia, 6(2), 115-130.
- Uba, M. (2016). *Pilkada dan ketahanan sosial: Memahami implikasi Pilkada serentak terhadap integrasi sosial*. Jurnal Ketahanan Nasional, 13(4), 15-30.
- Wahyudi, S. I. (2020). *Stabilitas politik dalam Pilkada serentak dan dampaknya terhadap ketahanan nasional*. Jurnal Pertahanan, 21(3), 101-116.
- Wibowo, Y. (2020). *Transparansi dalam Pilkada serentak dan pengaruhnya terhadap pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta Press.